

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(Term Of Reference/ToR)

FASILITASI REFORMASI BIROKRASI (RB)
dan AKUNTABILITAS KINERJA

Sub Kegiatan :

Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

JAYAPURA

2023

Kerangka Acuan Kegiatan
(Term Of Reference/ToR)
PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (good and clean governance) maka telah diupayakan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang bertujuan untuk menciptakan Birokrasi Pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, bersinergitas, bekerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.

Sasaran dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) adalah

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan efektif
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam penataan Reformasi Birokrasi (RB) yang dititik beratkan pada 8 area perubahan yaitu area Organisasi, area Tata Laksana, area Sumber Daya Aparatur, area Peraturan Perundang-undangan, area Pengawasan, area Akuntabilitas, area Pelayanan Publik dan area Budaya Kerja.

Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia yang setiap tahun dinilai oleh Presiden RI melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) telah memperlihatkan perkembangan peningkatannya setiap tahun namun pada Provinsi/Kab/Kota se Papua mengalami penurunan dimana dari 29 Kab/Kota se Papua hanya 4 Kab/Kota yang melaporkan pelaksanaan RB Pemda nya tuk Tahun 2021 yang dilaporkan di Tahun 2022 kepada Pemerintah Pusat yaitu Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab. Biak Numfor dan Kab.Jayawijaya.

Berikut adalah nilai RB Kab/Kota se Papua yang dikeluarkan oleh Presiden RI melalui MENPANRB RI adalah sebagai berikut :

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KAB KOTA SE PROVINSI PAPUA 2016-2021

Pendataan oleh Biro Organisasi Setda Prov.Papua

Reformasi Birokrasi (RB)												
Kab/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1 Provinsi Papua	39.82	C	58.03	CC	60.83	B	61.64	B	56.51	CC	56.96	CC
2 Kota Jayapura	45.14	C	52.24	CC	55.14	CC	58.31	CC	45.82	C	41.98	C
3 Kab. Jayapura					50.33	CC					41.98	C
4 Kab. Merauke					50.33	CC	56.02	CC				
5 Kab. Biak Numfor							30.16	C	39.69	C	44.42	C
6 Kab. Jayawijaya									24.17	D	44.11	C
7 Kab. Kep. Yapen												
8 Kab. Supiori												
9 Kab. Waropen												
10 Kab. Nabire												
11 Kab. Paniai												

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KAB KOTA SE PROVINSI PAPUA

Reformasi Birokrasi (RB)												
Kab/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
12 Kab. Deyai												
13 Kab. Dogiyai												
14 Kab. Intan Jaya												
15 Kab. Mimika												
16 Kab. Lanny Jaya												
17 Kab. Puncak Jaya												
18 Kab. Tolikara												
19 Kab. Yahukimo												
20 Kab. Nduga												
21 Kab. Mamb. Tengah												
22 Kab. Yalimo												

Sumber : KEMENPANRR RI

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KAB KOTA SE PROVINSI PAPUA

Reformasi Birokrasi (RB)													
	Kab/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
23	Kab. Peg. Bintang												
24	Kab. Puncak												
25	Kab. Keerom												
26	Kab. Sarmi												
27	Kab. Mambera Raya												
28	Kab. Mappi												
29	Kab. Asmat												
30	Kab. Boven Digoel												

Sumber : KEMENPANRB RI

Catatan rendahnya RB Pemda oleh KEMENPANRB RI yaitu

1. Masih rendah komitmen dari Pimpinan (khususnya Pemda);
2. Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai pemenuhan administrasi/ dokumen;
3. Pemahaman RB hanya sebatas pada Tim saja dan tidak dipahami di unit sehingga tidak terlihat implementasinya di unit kerja;
4. Resistensi terhadap perubahan karena dianggap mengganggu zona nyaman;
5. Rekomendasi hasil evaluasi RB oleh KEMENPANRB pada umumnya tidak ditindaklanjuti;
6. Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena instansi tidak mengkomunikasikan/mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat serta
7. Tidak ada penghargaan dan sanksi

Untuk meningkatkan RB pada Kab/kota se Papua maka Pemerintah Provinsi Papua di Tahun 2022 melalui Tim RB Provinsi Papua berupaya melakukan hal sbb :

1. dengan mengoptimalkan Penguatan Kapasitas terkait Reformasi Birokrasi (RB) dalam bentuk Pembinaan dan Pendampingan RB bagi Kab/Kota se Papua dengan menggunakan pendekatan di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua yaitu pada Wilayah Adat Lapago di Wamena 20-21 Juli 2022, Wilayah Adat Saireri dan Meepago di

Biak 3-4 Agustus 2022 serta Wilayah Adat Mamta dan Anim Ha di Kota Jayapura 30-31 Agustus 2022.

2. Membentuk Tim RB pada Kab/Kota se Prov.Papua serta
3. Mensosialisasikan RB secara internal di Lingkungan Pemda Prov/Kab/Kota se Papua agar Pemda Kab/Kota se Papua dapat melaporkan secara tepat waktu RB Pemda nya setiap Tahun kepada Presiden RI melalui MENPANRB RI.

2. DASAR PELAKSANAAN

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
4. Peraturan Menteri PANRB No.32 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Gubernur (Pergub) Papua, Nomor 69 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua. Nomor : 4.01.02.1.02.01 tanggal 8 Februari 2023 Tahun Anggaran 2023, kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang apa itu Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik);
2. Untuk mengetahui mekanisme Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
3. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan RB Tematik di Provinsi Papua Tahun 2023 dan
4. Untuk mempersiapkan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua juga Kab/Kota se Provinsi Papua dalam menghadapi pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2023 oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI.

4. HASIL KEGIATAN :

Hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Pemahaman terkait Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang terkait dengan :
 - 1) Tata Kelola Pemerintahan,
 - 2) Penanggulangan Kemiskinan,
 - 3) Peningkatan Realisasi Investasi,
 - 4) Penanganan Stunting,
 - 5) Pengendalian Inflasi,
 - 6) Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
 - 7) Inovasi lainnya yang menunjang Peningkatan Kinerja.
2. Terdapat pemahaman terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

3. Terdapat Potret Pelaksanaan Reformasi Tematik di Provinsi Papua Tahun 2023;
4. Kesepakatan Bersama untuk mengawasi dan mengawal implementasi RB Tematik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua juga bagi Kab/Kota se Provinsi Papua.

5. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Narasumber dari KEMENPANRB RI
2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
3. Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan
4. Panitia Pelaksana Kegiatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

6. WAKTU dan TEMPAT KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Agenda : Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Lokasi : Kota Jayapura, Provinsi Papua
Pelaksanaan : Selasa, 12 September 2023
Pukul : 08.00 – 17.00 WIT
Tempat : Ruang Pertemuan Hotel Horison Jayapura

7. BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan adalah sebagai berikut :

Biaya kegiatan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua. Nomor : 4.01.02.1.02.01 tanggal 8 Februari 2023 Tahun Anggaran 2023, dengan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

10. PENUTUP

Demikian Pengajuan Kerangka Acuan Kegiatan 'Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi' Tahun 2023 guna mengawal Sasaran Strategis dari Reformasi Birokrasi yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan efektif, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju Visi Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan.'


Jayapura, 30 Agustus 2023

KEPALA BAGIAN
KETATALAKSANAAN
SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN


FILIPUS ULUKYANAN, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660929 199203 1 004

MENGETAHUI :
KEPALA BIRO ORGANISASI
SEBAGAI
UNA ANGGARAN




S.Sos., MM
UTAMA MUDA
199112 2 001